

RENCANA KERJA

TAHUN 2022

DPUPR

Kab. Pasaman Barat



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PASAMAN BARAT**
Jl. M. Natsir Pasaman Baru-Simpang Empat
Telp. (0753) 4611984 Fax (0753) 7464233
email. puprkab.pasamanbarat@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 <i>Latar Belakang.....</i>	1
1.2 <i>Landasan Hukum.....</i>	1
1.3 <i>Maksud dan Tujuan.....</i>	3
1.4 <i>Sistematika Penulisan.....</i>	3
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020.....	7
2.1 <i>Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....</i>	7
2.2 <i>Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....</i>	18
2.3 <i>Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....</i>	22
2.4 <i>Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....</i>	23
2.5 <i>Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....</i>	35
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD.....	36
3.1 <i>Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....</i>	36
3.2 <i>Tujuan dan sasaran Renja OPD.....</i>	46
3.3 <i>Program dan Kegiatan.....</i>	47
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB V : PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain bertanggung jawab pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah.

Selanjutnya, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 disusun untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai penjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barart tahun 2021 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

- 1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- 2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
- 3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
- 4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
- 5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
- 6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjadi rancangan RKPD Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUPR Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPUPR

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 8 program. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2020. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2021), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2020 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2021) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2020
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2021		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase peningkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Aparatur	kapasitas aparatur yang profesional									
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)	75,44%	63,92%	68,17%	62,84%	92,18%	71,2%	64,08%	90%	
5	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten	52,14%	63,92%	43,05%	25,83%	60%	47,9%	31,13%	65%	
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase irigasi dengan kondisi baik	80%	77,5%	79%	86,74%	109,8%	79,5%	79,5%	100%	
7	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase ketersediaan sarpras kebinamargaan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
8	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengurangan Jorong tertinggal yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda	3 Jorong	8 Jorong	8 Jorong	4 Jorong	50%	5 Jorong	5 Jorong	100%	

		empat									
9	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Percentase perkuatan tebing/normalisasi sungai yang dibangun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	Percentase Pembangunan Infrastruktur Kawasan Ibukota Kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Percentase Rumah Tangga yang mendapat akses air bersih	100%	60%	93%	84,09%	90,41%	100%	90%	90%	
12	Program Perencanaan Tata Ruang	Percentase luas kawasan yang memiliki dokumen rencana tata ruang	14,92%	NA	7,25%	0%	0%	14,51%	10%	31,2%	
13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Percentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	7,26%	0%	0%	0%	0%	3,63%	1%	33%	

14	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelatihan terhadap Pelaku Jasa Konstruksi	NA								
----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	--

Tabel 2.1.2.
Evaluasi Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA		Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi Fisik)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	72,9	91
2	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	-	51,79%	51,79
3	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	-	82,29%	82,29
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
4	Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan/Dinas	6 Unit	6 Unit	100
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
5	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	80%	87,82%	110
IV Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
6	Perencanaan pembangunan jalan	5 Dok	5 Dok	100
7	Pembangunan jalan	75%	73%	97
8	Perencanaan pembangunan jembatan	10 Dok	2 Dok	20
9	Pembangunan jembatan	8 Unit	11 Unit	137
V Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan				
10	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	1 Dok	0	0
11	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	10 Dok	1 Dok	10
12	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	80%	84,21%	110
13	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	90%	98,77%	110

INDIKATOR KINERJA			Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi Fisik)
VI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				
	14	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	-	3 Dok	100
	15	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	10 DI	11 DI	110
	16	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	7 Kec	7 Kec	100
	17	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	80%	2,47%	3
	18	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa	14 DI	14 DI	100
VII	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal				
	19	Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal	1 Dok	1 Dok	100
	20	Pembangunan Daerah Tertinggal	1 Paket	1 Paket	100
VIII	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				
	21	Perencanaan turap/talud/bronjong	3 Dok	2 Dok	67
	22	Pembangunan turap/talud/bronjong	50%	100%	100
IX	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkotaan				
	23	Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	1 Dok	1 Dok	100
	24	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Kawasan Perkotaan	2 Paket	2 Paket	100
	25	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung Kawasan Perkotaan	9 Paket	7 Paket	78
X	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				
	26	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	7 Lokasi	7 Lokasi	100
	27	Pengembangan sistem distribusi air minum	7 Lokasi	7 Lokasi	100

INDIKATOR KINERJA		Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi Fisik)
XI	Program Perencanaan Tata Ruang			
	28	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	2 Dok	1 Dok
	29	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	80%	53,01%
	30	Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat	80%	49,86%
XII	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
	31	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	80%	28,41%
XIII	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
	32	Pembinaan Jasa Konstruksi	80%	29,15%

Berdasarkan Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 11 program teknis dan 2 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 33 kegiatan. Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 7 sasaran yang dijabarkan kedalam 11 indikator sesuai Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
2. Berkurangnya jumlah jorong tertinggal yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat
3. Presentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik
4. Persentase luas sawah yang beririgasi baik
5. Persentase penurunan luas genangan
6. Persentase penduduk yang mendapat akses air bersih
7. Persentase luas kawasan yang memiliki dokumen rencana ruang
8. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

9. Level Maturitas SPIP
10. Opini terhadap Laporan Keuangan
11. Nilai Sakip

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1.3** berikut :

Tabel 2.1.3.
Penilaian Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	68,17	62,84	92,18%
2	Berkurangnya jumlah jorong tertinggal yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat	8,00	4,00	50%
3	Presentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik	43,05	25,83	60%
4	Persentase luas sawah yang beririgasi baik	79,00	86,74	109,8%
5	Persentase penurunan luas genangan	10,00	10,00	100%
6	Persentase penduduk yang mendapat akses air bersih	93,00	84,09	90,41%
7	Persentase luas kawasan yang memiliki dokumen rencana ruang	7,25	0	0%
8	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	0	0	0%
9	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	50 %
10	Opini terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100 %
11	Nilai Sakip	B	CC	50 %

Berdasarkan Tabel 2.1.3 diatas dapat diartikan bahwa terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang telah memenuhi dan melewati dari target rencana kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya Layanan Daerah irigasi dengan realisasi 86,74% dari Target 2019 sebesar 79%.
2. Mengurangi Luas Genangan dengan realisasi 10% dari Target 2019 sebesar 10%.

Sementara itu, 4 (empat) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja yang belum mencapai target rencana kinerja, namun diupayakan tercapai di tahun 2020, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan jalan,
 - Indikator Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan realisasi 62,84% dari Target 2019 sebesar 68,17%.
 - Indikator Berkurangnya jumlah jorong tertinggal yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat dengan realisasi 4% dari Target 2019 sebesar 8%.
 - Indikator Presentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik dengan realisasi 25,83% dari Target 2019 sebesar 43,05%.
2. Meningkatnya ketersediaan air bersih kepada masyarakat dengan realisasi 84,09% dari Target 2019 sebesar 93,00%.
3. Meningkatkan perencanaan tata ruang dengan realisasi 0% dari Target 2019 sebesar 7,25%.
4. Meningkatkan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan realisasi 0% dari Target 2019 sebesar 0%

Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD belum bisa dicantumkan karena sedang proses penilaian oleh BPKP, BPK, Inspektorat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Pemerintah Daerah periode 2016-2021 yaitu :

Misi 3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis daya saing lokal, regional dan global, melalui pencapaian tujuan Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah berbasis daya tampung lingkungan dengan indikator utama, yakni : Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang, Rasio jaringan irigasi baik dan sedang, Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman dan memadai.

Misi 4. Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pencapaian tujuan meningkatkan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan daerah berbasis pemberdayaan dan peningkatan kualitas lingkungan dengan indikator utama, yakni : Jumlah jorong tertinggal dan terisolir, Akses jalan poros ke daerah-daerah terpencil, Jalan akses ke

daerah tertinggal dan terisolir yang terbangun, Jembatan akses ke daerah tertinggal dan terisolir yang terbangun, Cakupan jaringan air bersih daerah tertinggal dan terisolir.

Misi 6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola sumber daya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pencapaian tujuan meningkatkan pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan penataan ruang yang berbasis daya dukung dan berwawasan lingkungan dengan indikator utama yakni : Persentase kesesuaian penataan ruang, Persentase tersedianya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan, Tersedianya taman tematik.

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021. Pengukuran pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2020 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2020 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra DPUPR				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap			63,92	68,17	71,20	75,44	65,78	62,84	71,20	75,44	
2	Berkurangnya jumlah jorong tertinggal yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat			13	8	5	3	10,00	4,00	5	3	
3	Presentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik			38,80	43,05	47,90	52,14	38,80	25,83	47,90	52,14	
4	Persentase luas sawah yang beririgasi baik			77,50	79,00	79,50	80,00	64,56	86,74	79,50	80,00	
5	Persentase penurunan luas genangan			5,00	10,00	20,00	25,00	5,00	10,00	20,00	25,00	
6	Persentase penduduk yang mendapat akses air bersih			88,00	93,00	100,00	100,00	88,00	84,09	100,00	100,00	
7	Persentase luas kawasan yang memiliki dokumen rencana ruang			3,63	7,25	14,51	14,92	3,63	0	14,51	14,92	
8	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang			0	0	3,63	7,26	0	0	3,63	7,26	
9	Level Maturitas SPIP			3,00	3,00	3,00	3,00	2	2	3,00	3,00	

10	Opini terhadap Laporan Keuangan			<i>WTP</i>								
11	Nilai Sakip			<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>CC</i>	<i>CC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Belum adanya program jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan program (Rencana Induk Sistem) maupun validitas *data base* tentang infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Program pembangunan masih bersifat parsial/belum ada keterpaduan.
3. Analisis biaya dan manfaat belum dilaksanakan secara konsekuensi dalam setiap pengajuan rencana kegiatan sehingga dampaknya menjadi tidak jelas.
4. Masih sangat kurang memadainya kualitas maupun kuantitas infrastruktur dan prasarana dasar lainnya.
5. Peralatan yang dimiliki masih sangat terbatas, baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi pelayanan dan khususnya bila terjadi kebutuhan mendesak akibat Bencana Alam dan lain sebagainya.
6. Partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam pemanfaatan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun.
7. Belum terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang daerah.
8. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi teknis bidang ke Pemerintahan dan Penataan Ruang
9. Belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tepat dan akurat.
10. Belum terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkelanjutan.
11. Belum terselenggaranya Pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi Pengaturan, Pendanaan dan Pengaman bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat berperan sebagai pelaksana dalam proses pembangunan. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat selain berkoordinasi dengan OPD terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian terkait. Untuk itu, aparatur pemerintah yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman

Barat harus melakukan fungsi ganda, selain menjalankan Tupoksi utama di tingkat Kabupaten, juga harus bersinergi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian terkait, sementara Sumber Daya Manusia yang ada saat ini masih terbatas dari segi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan SDM serta mekanisme pelaksanaan pembangunan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi untuk Pembangunan Daerah, seperti :

1. Banyaknya program/kegiatan yang muncul di APBD namun tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan terkait. Akibatnya, ada kegiatan yang tidak bisa diukur pencapaiannya dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Adanya program kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten).
3. Adanya usulan/kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen APBD
4. Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam rencana kerja APBD
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan di daerah sangatlah membutuhkan SDM yang berkualitas dan lengkap serta ditujang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 118.870.551.402,-** untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2022. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 8 program (teknis dan rutin) yang direncanakan.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)		
							Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur		Target				
							Program / kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					99.840.121.530						
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.282.255.260						
1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.507.786.419						
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	78 Orang	7.244.252.711							
1	03	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi Keuangan	12 Bulan	238.093.708							
1	03	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	25.440.000							
1	03	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					26.050.000						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)		
							Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Analisis Kebutuhan						
							Tolok Ukur	Target		Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	03	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DPUPR	1 Orang	11.050.000							
1	03	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Orang	15.000.000							
1	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah				262.092.000							
1	03	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK	20 Orang	262.092.000							
1	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.750.088.841							
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	15 Jenis	12.667.000							
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ATK yang dibutuhkan	55 Jenis	1.183.524.000							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)		
							Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Analisis Kebutuhan						
							Tolok Ukur	Target		Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan logistik kantor (bahan bbm kendaraan dinas, bbm mesin potong rumput, bbm genset)	2700 Liter	29.160.000							
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map DPUPR yang dibutuhkan	1040000 Lembar	278.000.000							
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	12 Bulan 12 Bulan	246.737.841							
1	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				376.650.000							
1	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium dan pusat (K/L) yang diikuti Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	1 Unit 19 Unit	376.650.000							
1	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				423.690.000							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)		
							Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Analisis Kebutuhan						
							Tolok Ukur	Target		Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Materai	6250 Lembar	22.100.000							
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 Bulan	342.450.000							
1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	5 Orang	59.140.000							
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				935.898.000							
1	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas (service dan ganti suku cadang kendaraan dinas)	12 Bulan	158.070.000							
1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan yang diperbarui perizinannya	12 Bulan	114.665.000							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)		
							Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Analisis Kebutuhan						
							Tolok Ukur	Target		Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	03	01	2,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah alat berat yang dipelihara	10 Unit	362.603.000							
1	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	152 Unit	100.560.000							
1	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemeliharaan berkala kantor Dinas PUPR	4 Unit	200.000.000							
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				19.549.916.190							
1	03	02	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.805.632.500							
1	03	02	2,01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang bangunan perkuatan tebing	2200 Meter	3.805.632.500							
1	03	02	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.744.283.690							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)		
							Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Analisis Kebutuhan						
							Tolok Ukur	Target		Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	03	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan	1 Dokumen	0							
1	03	02	2,02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	400 Meter	424.700.000							
1	03	02	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun/dipelihara	6600 Meter	14.912.768.690							
1	03	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi O & P Jaringan irigasi	7 Kecamatan	406.815.000							
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				11.905.323.800							
1	03	03	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				11.905.323.800							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)		
							Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Analisis Kebutuhan						
							Tolok Ukur	Target		Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	03	03	2,01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan spam kawasan perkotaan	4 Lokasi	11.390.451.000							
1	03	03	2,01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan spam kawasan perdesaan	4 Lokasi	514.872.800							
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3.550.000.000							
1	03	06	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.550.000.000							
1	03	06	2,01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang drainase yang dibangun	2500 Meter	3.550.000.000							
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				1.671.050.000							
1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				1.671.050.000							
1	03	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan	2 Unit	1.671.050.000							
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				51.049.163.280							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)		
							Keluaran Sub Kegiatan			Target		Program / kegiatan				
							Tolok Ukur	Target		Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					51.049.163.280						
1	03	10	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan	5 Dokumen	288.264.809							
1	03	10	2,01	05	Pembangunan Jalan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan yang dibangun	15850 Meter	2.067.800.000							
1	03	10	2,01	08	Rekonstruksi Jalan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan yang direkonstruksi	18400 Meter	32.797.104.000							
1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan yang di pelihara rutin	35000 Meter	430.520.000							
1	03	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jembatan yang dibangun	8 Unit	15.415.474.471							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)		
							Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Analisis Kebutuhan						
							Tolok Ukur	Target		Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	03	10	2,01	18	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jembatan yang direhab	1 Unit	0							
1	03	10	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jembatan yang dipelihara rutin	10 Unit	50.000.000							
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				335.660.000							
1	03	11	2,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				335.660.000							
1	03	11	2,01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	50 Orang	335.660.000							
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				496.753.000							
1	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				237.200.000							
1	03	12	2,01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perda yang dilegalisasi	1 Perda	237.200.000							
1	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				259.553.000							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)		
							Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Analisis Kebutuhan						
							Tolok Ukur	Target		Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	03	12	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan	20 Rekomendasi	259.553.000							
								TOTAL	99.840.121.530							

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat adalah mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Kabupaten

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat yang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah. Usulan – usulan tersebut berupa :

1. Proposal yang disampaikan masyarakat secara berkelompok.
2. Usulan melalui Anggota DPRD.
3. Usulan melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang Nagari sampai Musrenbang Kabupaten.

Usulan – usulan tersebut diatas tetap memperhatikan tujuan dan sasaran DPUPR serta skala prioritas dan dilengkapi dengan Readiness Criteria.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum Nasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu ;

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisikpotensi ekonomi dan budaya lokal;
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan Rencana Kerja 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 38 menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi;
4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang koneksi antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;
5. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana;

6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang;
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi RKP 2019, Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Maka, RKP 2021 mengusung tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 menanggapi bencana pandemi COVID-19. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi akibat dari pandemi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan terutama kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2016-2021 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
I	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan: <ul style="list-style-type: none"> a) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan b) Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan c) Pemerataan Layanan Pendidikan dan Pengembangan Iptek-Inovasi d) Pengentasan Kemiskinan e) Pembangunan Budaya Karakter, dan Prestasi bangsa 	1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Penanggulangan kemiskinan pengangguran dan daerah tertinggal berbasis pemberdayaan keluarga dan masyarakat 2. Pembangunan kualitas sumber daya manusia pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga • Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial • Program pembinaan panti asuhan /panti jompo • Program pengembangan wawasan kebangsaan • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Nagari/Perdesaan • Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan • Program Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan • Program obat dan perbekalan kesehatan • Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak • Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
				<p>Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular • Program pengawasan obat dan makanan • Program pengembangan lingkungan sehat • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan • Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan • Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		<p>3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan</p>	<p>3. Pembangunan kualitas sumber daya manusia pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan Anak Usia Dini • Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun • Program Peningkatan Kualitas Hasil Belajar • Program Manajemen Pelayanan Pendidikan • Program Pendidikan Non Formal • Program bantuan Operasional Sekolah
		<p>4. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi</p>	<p>4. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan pemahaman, pengetahuan, pengamalan dan pengembangan nilai keagamaan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
		Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Prestasi Keagamaan • Program pengembangan wawasan kebangsaan • Program peningkatan peran serta kepemudaan • Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda • Program Pengembangan Nilai Budaya
II	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah: <ul style="list-style-type: none"> a) Perluasan Infrastruktur Dasar b) Penguatan Infrastruktur Daerah Tertinggal, dan Ketahanan Bencana c) Penguatan Konektivitas Multimoda dan antar moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi d) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan e) Transformasi Digital 	1. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	1. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan • Program Pengembangan Perumahan • Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkotaan • Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah • Program perencanaan pembangunan daerah • Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam • Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong • Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan • Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
			<ul style="list-style-type: none"> • Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana • Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana • Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi • Program Pengembangan Data/ Informasi • Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas • Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa • Program kerjasama informasi dengan mas media <p>2. Pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan penataan ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Tata Ruang • Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
III	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kewirausahaan dan UKM 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi, Sektor Riil dan Industrialisasi 3. Peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan koperasi,IKM dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM • Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan • Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan • Program peningkatan dan pengembangan ekspor • Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
	Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 4. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 5. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		2. Pengembangan perdagangan, Investasi, Jasa, Pariwisata dan Industri Kreatif melalui Peningkatan Kulitas Tanaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Program peningkatan dan pengembangan ekspor • Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Program Peningkatan Kesempatan Kerja • Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan • Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi • Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi • Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi • Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perizinan dan Non Perizinan • Program pengembangan destinasi pariwisata • Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata • Program Pengelolaan Keragaman Budaya • Program pengembangan Industri Kreatif
		2. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	3. Peningkatan kedaulatan pangan, agroindustri dan kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan budidaya perikanan • Program pengembangan perikanan tangkap • Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan • Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) • Program Peningkatan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
				<p>Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kesejahteraan Petani • Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan • Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan • Program peningkatan produksi hasil peternakan
IV	<p>Ketahanan Pangan, Air , Energi, dan Lingkungan Hidup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aksesibilitas Air 3. Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Penyediaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 5. Penguatan Ketahanan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis. 2. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur 3. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kedaulatan pangan, agroindustri dan kemaritiman 2. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah 3. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan • Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan • Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) • Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan • Program pengembangan budidaya perikanan • Program pengembangan perikanan tangkap • Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah • Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan • Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
			lingkungan	<p>Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Program peningkatan pengendalian polusi • Program Perencanaan Tata Ruang • Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana • Program Peningkatan Kelembagaan Kebencanaan • Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana • Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam • Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana
V	<p>Stabilitas Pertahanan dan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kemampuan Pertahanan 2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional 3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dalam agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter 2. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi 	<p>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>Program pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal</p> <p>Program pendidikan politik masyarakat</p> <p>Program penataan peraturan perundang-undangan</p> <p>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan</p>

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
	4. Penanggulangan Terorisme dan Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut 5. Penaggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas	pemerintahan	birokrasi	pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat Tahun 2021

MISI	TUJUAN MISI	SASARAN MISI	TUJUAN DPUPR
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan inovatif	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Infrastruktur Yang Berkualitas dan Terwujudnya Penataan Kota Yang Sesuai Dengan Tata Ruang
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pembangunan yang inklusif	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan Meningkatnya koneksi wilayah	
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Pelestarian lingkungan hidup, penataan ruang wilayah dan penanggulangan bencana	Pengendalian pemanfaatan ruang	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana tahun 2021-2026 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang wilayah. Untuk mendukung dalam merealisasikan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dana yang tidak hanya melalui dana APBD saja namun juga dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN. Secara garis besar, rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 tertuang dalam 10 Program, 21 Kegiatan, 58 Sub-Kegiatan. Dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 493.288.659.487,-**.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2022 merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran yang diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD. Prioritas Pembangunan diterjemahkan kedalam 3 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat Tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 10 program, 21 kegiatan dan 58 sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat pada tahun 2022 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp. 493.288.659.487,-** sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.00.00.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.00.00.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKATAKAN DENGAN PELAYANAN DASAR								493,288,659,487					439,116,198,186	
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								12,170,781,017					12,733,711,674	
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								40,757,525					44,833,277	
1 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Persentase realisasi keuangan		100 %	3 Dokumen	100 %	40,757,525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	44,833,277	
1 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,866,903,472					9,749,685,682	
1 3 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Persentase realisasi keuangan		100 %	78 Orang	100 %	7,639,643,472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8,403,699,682	
1 3 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan PTI/THL	Persentase realisasi keuangan		100 %	1 Tahun	100 %	1,044,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,145,280,000	
1 3 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Persentase realisasi keuangan		100 %	12 Bulan	100 %	182,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	200,706,000	
1 3 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								66,400,000					73,040,000	
1 3 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DPUPR	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah yang dikelola DPUPR		100 %	1 Orang	12 Bulan	40,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	44,385,000	
1 3 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah yang dikelola DPUPR		100 %	1 Orang	12 Bulan	26,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	28,655,000	
1 3 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								232,932,000					256,225,200	
1 3 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		100 %	20 Orang	20 Orang	232,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	256,225,200	
1 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								758,188,800					781,937,373	
1 3 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banjir Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	15 Jenis	100 %	12,667,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	11,767,335	
1 3 1 2.06 2	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	55 Jenis	100 %	193,900,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	131,330,078	
1 3 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah logistik yang dibutuhkan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1 Tahun	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	32,066,760	
1 3 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map DPUPR yang dibutuhkan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1040000 Lembar	100 %	285,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	313,720,000	
1 3 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyelenggaraan maks/minum/rapat koordinasi/Jumlah rapat koordinasi dari perwakilan provinsi dan pusat (K/L) yang dilikuti	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	12 Bulan	100 %	266,412,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	293,053,200	
1 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								383,366,350					421,702,985	
1 3 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		100 %	19 Unit	100 %	383,366,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	421,702,985	
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								368,158,620					404,974,482	
1 3 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Honor THL	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah		100 %	2 Orang	100 %	22,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	24,310,000	
1 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map DPUPR yang dibutuhkan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah		100 %	1040000 Lembar	100 %	285,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	314,105,000	
1 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah		100 %	5 Orang	100 %	60,508,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	66,559,482	
1 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,454,074,250					1,001,312,675	
1 3 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Pribadi	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas (service dan ganti saku cadang kendaraan dinas)	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		100 %	12 Bulan	100 %	174,976,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	192,473,875	
1 3 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perzinsian Alat Besar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan yang diperbarui perzinsinya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		100 %	12 Bulan	100 %	105,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	116,270,000	
1 3 1 2.09 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perzinsian Alat Besar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah alat berat yang dipelihara	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		100 %	3 Unit	100 %	793,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	275,000,000	
1 3 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		100 %	152 Unit	100 %	82,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	90,937,000	
1 3 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemeliharaan berkala kantor Dinas PUPR	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		100 %	4 Unit	100 %	296,938,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	326,631,800	
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								25,337,758,127					23,516,680,499	
1 3 2 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								11,855,000,000					3,633,606,040	
1 3 2 2.01 9	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Jumlah Tanggul Sungai yang dibangun	Persentase sungai dengan kondisi baik		80 %	1 Paket	80 %	3,550,000,000			Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %	0	
1 3 2 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Pembangunan TPT Sungai Batang Mandirangan				150 M					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %	2,610,629,782	
1 3 2 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Pengawasan Perkuatan Tebing Paket I	Persentase sungai dengan kondisi baik		80 %	1 Paket	80 %	8,305,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Pengawasan Perkuatan Tebing Paket II				1 Paket					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Pengawasan Perkuatan Tebing Paket III				1 Paket					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								13,482,758,127					19,883,074,459	
1 3 2 2.02 1	Penyusunan Teknik Pemeliharaan Jaringan Irrigasi	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Survey Updating Kondisi Jaringan Irrigasi Kecamatan Gunung Tuleh	Persentase irigasi dengan kondisi baik		80 %	1 Paket	80 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 1	Penyusunan Teknik Pemeliharaan Jaringan Irrigasi	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Survey Updating Kondisi Jaringan Irrigasi Kecamatan Kinulai	Persentase irigasi dengan kondisi baik		80 %	1 Paket	80 %	1,150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 2	Pembangunan Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Persentase irigasi dengan kondisi baik			80 %	800 Meter	80 %	1,150,000,000			Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %	0	
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Operasi dan Pemeliharaan				1 Tahun					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Pengawasan DAK Irrigasi tahun 2022				1 Paket					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Peningkatan Jaringan Irrigasi D.I. Ala Salak				20 Ha					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Peningkatan Jaringan Irrigasi D.I. Aur Kuning				57 Ha					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Peningkatan Jaringan Irrigasi D.I. Durian Sabukai				20 Ha					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Peningkatan Jaringan Irrigasi D.I. Lubuk Barantai				12 Ha					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Peningkatan Jaringan Irrigasi D.I. Lubuk Langit				1 Paket					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Peningkatan Jaringan Irrigasi D.I. Lubuk Langit				30 Ha					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Peningkatan Jaringan Irrigasi D.I. Banda Maruok				15 Ha					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Peningkatan Jaringan Irrigasi D.I. Batang Karumai				70 Ha					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Peningkatan Jaringan Irrigasi D.I. Batang Kerenai				45 Ha					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Peningkatan Jaringan Irrigasi D.I. Batang Sarit				27 Ha					Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1 3 10 2.01	8 Rekonstruksi Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Kantor Camat Ujung Gading Lembah Melintang			95 %	0.85 KM		268,937,563,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	266,905,723,700	
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Kapundung-Tanjung Medan Kinali				6.7 KM							
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Kota Baru - Maligi Sasak Ranah Pasie				10 KM							
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Pati bubur-Lubuk Buntar Sungai Beremas				1.6 KM							
			Rekonstruksi struktur kapasitas jalan Pengambaran - Rura Patontang Koto Balinka				2.4 KM							
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Pilubang Kajai-Pasir Putih Talamau				2.3 KM							
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Sasak-Pohon Seribu Sasak Ranah Pasie				2.8 KM							
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Simpang IV Koto Sawah- Batang Gunung Lembah Melintang				5.2 KM							
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Simpang Sayur-Koto Sawah Lembah Melintang				4.9 KM							
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Situng-Sawah Kubang Sungai Aur				1.5 KM							
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Skunder I-Blok C Ophir Luhak Nan Duo				2.2 KM							
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Sporsa-Kampung Lamu Sungai Aur				1.6 KM							
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Tambang Jarung-Simpang Gadang Lembah Melintang				2.3 KM							
			Rekonstruksi struktur kapasitas jalan Tambang Padang - Tameng Tengah Ranah Batahan				5.5 KM							
			Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Tareh-Salur Lembah Melintang				4.8 KM							
1 3 10 2.01	9 Rehabilitasi Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Pembangunan Jembatan Batang Biliaan (Ruas KKN-Hibrida) (DAK)				30 Meter							
			Pembangunan Jembatan Batang Masang Katiagan				80 Meter							
			Pembangunan Jembatan Batang Pua (K.301.2) (DAK)				12 Meter							
			Pembangunan Jembatan Batang Tion - Kampung Cubadak				15 Meter							
			Pembangunan Jembatan Ganting-Simpang Tolong Silapung				70 Meter							
			Pembangunan Jembatan Irigasi Kampung Cubadak				7 Meter							
			Pembangunan Jembatan Jambak Jular 8 Timur Lingkuang Aua Pasaman				1 Unit							
			Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Rura Patontang I				12 Meter							
			Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Rura Patontang II				8 Meter							
			Pembangunan Jembatan Sikilang				60 Meter							
			Pembangunan Jembatan Tombang (DAK)				30 Meter							
			Pembangunan Jembatan Tombang Jarung				50 Meter							
1 3 10 2.01	10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Jumlah jalan yang dipelihara berkala				95 %	1 Tahun	95 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	1,405,830,360
1 3 10 2.01	11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Jumlah jalan yang dipelihara rutin				95 %	1 Tahun	95 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	1,078,698,062
1 3 10 2.01	12 Pembangunan Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Pembangunan Jembatan Batang Biliaan (Ruas KKN-Hibrida) (DAK)				30							
			Pembangunan Jembatan Batang Masang Katiagan				8							
			Pembangunan Jembatan Batang Pua (K.301.2) (DAK)				12							
			Pembangunan Jembatan Batang Tion - Kampung Cubadak				15							
			Pembangunan Jembatan Ganting-Simpang Tolong Silapung				70							
			Pembangunan Jembatan Irigasi Kampung Cubadak				7							
			Pembangunan Jembatan Jambak Jular 8 Timur Lingkuang Aua Pasaman				1 Unit							
			Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Lingkuang Aua Pasaman				1 Unit							
			Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Rura Patontang I				12							
			Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Rura Patontang II				8							
			Pembangunan Jembatan Sikilang				60							
			Pembangunan Jembatan Tombang (DAK)				30							
			Pembangunan Jembatan Tombang Jarung				50							
1 3 10 2.01	18 Rehabilitasi Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Jumlah jembatan yang direhab				95 %	1 Unit	95 %	2,550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	1,579,916,468
1 3 10 2.01	19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Jumlah jembatan yang dipelihara rutin				95 %	1 Unit	95 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mampang (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	65,865,580
1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												1,859,464,123	
1 3 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi												459,823,650	
1 3 11 2.01	4 Pelatihan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi			100 %	50 Orang	100 %	319,719,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	351,690,900
1 3 11 2.01	6 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi			100 %	25 Orang	100 %	67,844,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	74,628,400
1 3 11 2.01	8 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi			100 %	25 Orang	100 %	30,458,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	33,504,350
1 3 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												62,964,000	
1 3 11 2.02	1 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi			100 %	50 Orang	100 %	57,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	62,964,000
1 3 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi												1,336,676,473	
1 3 11 2.04	2 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi			100 %	1 Kali	100 %	118,874,843	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	1,307,623,273
1 3 11 2.04	3 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	"Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi"	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi			100 %	1 Kali	100 %	26,412,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	29,053,200
1 3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												1,754,355,680	
1 3 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota												1,350,902,080	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target		
1 3 12.2.01	3 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase terselenggaranya penataan ruang	Penyusunan RDTK Kawasan Kota Air Bangis	Persentase terselenggaranya penataan ruang	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	3,600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terselenggaranya penataan ruang	100 %	1,350,902,080
1 3 12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								366,776,000				403,453,600
1 3 12.2.03	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase terselenggaranya penataan ruang	Jumlah perda yang dilengkapi	Persentase terselenggaranya penataan ruang	100 %	1 Perda	1 Perda	100 %	366,776,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terselenggaranya penataan ruang	100 %	403,453,600
									TOTAL	493,288,659,487			439,116,198,186

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan satu tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergis untuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat beserta seluruh personil diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

Melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan sesuai dengan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 yaitu "**TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SECARA MERATA DAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PENATAAN RUANG**".

Simpang Empat, 06 Agustus 2021
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

